



Agenda Setting Al Jazeera dalam Konflik Mesir tahun 2013 : Analisis Peran Media Sebagai Aktor Diplomasi Publik Qatar

Retno Sri Wahyuni

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro
Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269 Website
<http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip.undip.ac.id

ABSTRACT

As active mainstream media in Middle East, News station Al Jazeera TV located in Qatar, often produce propaganda. As result, Al Jazeera TV considered threatening the regime. In fact, the force to close this News Station has been a part of threaten demand of Gulf Country when Qatar diplomatic crisis appeared in 2017. This research, the writer focus on Al Jazeera role in the case of the overthrow of the regime of President Mohamed Morsi in Egypt in 2013. Some of the parties claim that Al Jazeera are neutral in delivering the news in present a new viewpoint for this conflict, while the other party claim Al Jazeera is biased for it is impressed by the Muslim Brotherhood that at the time Against President Mohamed Morsi's regime. This study would explain the role of Al Jazeera TV using a public diplomacy approach. Specifically, the study argued that Al-Jazeera support people at the time it was a form of propaganda in public diplomacy.

Keywords : *Qatar, Al Jazeera TV, Public Diplomacy, Muslim Brotherhood*

PENDAHULUAN

Krisis yang terjadi pada tahun 2013 merupakan penggulingan presiden kedua yang dialami oleh negara Mesir. Dua tahun setelah digulingkannya Presiden Hosni Mubarak di tahun 2011, negeri piramida ini kembali mengalami pergantian rezim. Presiden Mohamed Morsi yang merupakan pemimpin pertama Mesir yang dipilih melalui pemilihan umum ini digulingkan rakyatnya bersama-sama dengan militer karena dianggap tidak memenuhi janji-janji kampanye dan terlalu terpengaruh oleh kelompok Ikhwanul Muslimin (*Muslim Brotherhood*), namun tidak sedikit pula rakyat Mesir yang bersimpati terhadap Morsi. Penggulingan Presiden Morsi ini pun diwarnai oleh perpecahan rakyat Mesir yang Pro dan Kontra terhadap Presiden ini. Uniknya, stasiun televisi sebagai media massa yang paling banyak berperan dalam konflik tersebut juga terbagi menjadi dua kubu yang sama. Al Jazeera sebagai stasiun TV tersohor pun tentu tidak ketinggalan menyampaikan berita ini kepada publik, namun pemberitaan televisi ini menimbulkan kontroversi karena bias terhadap salah satu pihak, yaitu Ikhwanul Muslimin (kubu Pro Morsi). . Karena besarnya pengaruh Al Jazeera di Timur Tengah, dalam dunia jurnalistik kemudian dikenal istilah *Al Jazeera Effect* yang berarti bagaimana pemberitaan yang disampaikan oleh Al Jazeera mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara. Dalam penelitian ini, penulis bermaksud untuk menganalisis penggunaan Al Jazeera sebagai alat diplomasi publik oleh pemerintah Qatar dalam kasus kudeta Mesir 2013. Karena Al Jazeera merupakan stasiun TV yang didanai oleh

pemerintah Qatar, maka terdapat kemungkinan pemberitaan yang disampaikan oleh Al Jazeera merupakan cerminan dari kebijakan luar negeri Qatar. Dengan menggunakan pendekatan diplomasi publik, penulis akan menjelaskan bahwasannya bias pemberitaan yang dilakukan oleh Al Jazeera merupakan usaha pemerintah Qatar untuk mengkomunikasikan pandangannya kepada publik sehingga memiliki persepsi yang sama dengan pemerintah Qatar. Dengan demikian, penelitian ini akan memperkaya sudut pandang dalam memahami politik luar negeri Qatar terhadap kudeta Mesir pada tahun 2013.

PEMBAHASAN

Al Jazeera adalah stasiun televisi asal Qatar yang berdiri pada tahun 1996 atas pendanaan Emir Qatar pada saat itu, Hamad Bin Khalifa Al Thani. Emir Shaikh Hamad yang baru saja menaiki tahta pada tahun 1995 tergolong masih muda saat menjabat (44 tahun) dan dikenal terbuka akan pemikiran-pemikiran sosial dan politik dari Barat dibandingkan dengan pemimpin-pemimpin Timur Tengah lainnya. Dalam masa jabatannya Emir Shaikh Ahmad telah membawa hal-hal baru bagi Qatar seperti membuka izin hak pilih bagi perempuan warga negara Qatar pada tahun 1999. Revolusi hak perempuan ini merupakan yang pertama diantara negara-negara Teluk lainnya). Pada masa pemerintahan Emir Shaikh Ahmad pula revolusi media dilakukan. Ia membuat penghapusan penyensoran media-media oleh Pemerintah Qatar. Perubahan ini ditandai dengan dibubarkannya Kementrian Informasi yang selama ini bertugas untuk menyensur konten-konten media sebelum ditayangkan kepada masyarakat. Perubahan regulasi ini berjalan seiring dengan berkembangnya Al Jazeera TV sebagai media tersohor di Qatar. Pers, radio, dan Stasiun TV di Qatar akhirnya diperbolehkan untuk mendapat kebebasan dalam menyampaikan berita, sehingga para pelaku jurnalisme tersebut saling berlomba untuk meningkatkan kualitas. Meskipun mengalami reformasi media yang baik, namun para jurnalis Qatar masih mempunyai “garis merah” dalam menyampaikan informasi, yaitu tidak boleh mengomentari keluarga Emir, Al Thani. Lahirnya Al Jazeera merupakan proyek dan cita-cita sang Emir, Shaikh Ahmad bahkan sebelum beliau naik tahta. Disaat masih menjadi Putra Mahkota, Shaikh Ahmad sudah mengonseptkan Al Jazeera TV sebagai stasiun TV yang menggabungkan antara hiburan dan channel berita. Surat Keputusan Emir untuk mendirikan Stasiun TV Al Jazeera dikeluarkan pada Februari 1996, kemudian Stasiun TV ini mengudara untuk pertama kalinya pada 1 November di tahun yang sama. Dalam proses pendiriannya, Al Jazeera TV dikonseptkan oleh sebuah Komite yang beranggotakan tiga orang yaitu Adnan al-Sharif yang merupakan seorang jurnalis, Muhammad Suhlawi yang adalah penasihat keuangan, dan Emir Al-Thani sendiri (Bahry, 2001).

Sejak awal diluncurkan hingga awal tahun 2000, Al Jazeera TV merupakan saluran TV hanya berfokus pada penyajian berita seputar tanah Arab dan sekitarnya. Dengan semakin naiknya nama Al Jazeera TV maka stasiun berita tersebut mulai memperluas ranahnya dengan menambahkan saluran tambahan di luar saluran asli yaitu Al Jazeera Arabic. Adapun saluran tambahan yang didirikan antara lain, Al Jazeera Amerika (AJ America), Al Jazeera Plus (AJ+), Al-Jazeera Arab (AJ Arabic), Al Jazeera Balkans (AJ Balkans), Al-Jazeera Turki (AJ Turki), Al Jazeera Mubasher, dan Al Jazeera Dokumenter (AJ Documentary). Para intelektual Arab mengatakan bahwa Al Jazeera membawa angin segar ditengah pilihan media lokal tradisional yang selama ini kolot dan monoton. Al Jazeera juga disaksikan oleh jutaan Arab yang tengah mempelajari Barat dan kebebasan media. CNN dan media-media Barat lainnya yang dulunya menjadi haluan bagi masyarakat yang ingin mendapat sudut pandang baru di luar media tradisional Arab yang cenderung dikendalikan pemerintah, kini telah tergantikan posisinya oleh Al Jazeera TV. Meskipun jauh lebih kritis dibandingkan media-media Arab tradisional, CNN dan media Barat lainnya tetaplah media luar yang menggunakan bahasa Inggris dan memakai sudut pandang Barat dalam melihat peristiwa

yang terjadi di Timur Tengah, bukan menggunakan sudut pandang Timur Tengah itu sendiri. Al Jazeera hadir menyampaikan berita-berita berani dengan menggunakan sudut pandang Arab yang semakin membuat media ini disukai oleh masyarakat Timur Tengah.

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, tidak semua pihak setuju dengan pemberitaan kritis Al Jazeera TV. Beberapa negara Arab sudah menyatakan sikap tidak senangnya atas televisi asal Qatar ini. Protes pun ditujukan oleh beberapa negara kepada pemerintah Qatar agar segera “mengontrol” medianya tersebut; bahkan terdapat beberapa negara yang menutup paksa kantor cabang Al Jazeera TV di negara mereka. Al Jazeera dinilai terlalu mengintervensi negara-negara tersebut melalui pola pemberitannya yang berani, bahkan mengkritisi rezim yang ada. Meskipun Al Jazeera berstatuskan milik swasta, namun karena “ulah” stasiun tv tersebut, beberapa negara sampai menarik perwakilan diplomatiknya dari Doha. Hingga yang terbaru, negara-negara GCC memasukkan tuntutan agar Qatar menutup Stasiun TV Al Jazeera pada saat mengembargo negara ini. Hal ini berarti menunjukkan bahwa pemberitaan Al Jazeera ini telah mempengaruhi kondisi politik dalam dan luar negeri negara-negara di sekitarnya. Meskipun pola pemberitaan yang berani dan kritis ini sangat disambut baik oleh masyarakat Timur Tengah, namun hal ini tidak terlalu disenangi oleh pemerintah yang selama ini mempunyai kuasa penuh atas informasi yang beredar di masyarakat. Dalam menyampaikan berita, Al Jazeera menggunakan kacamata, budaya, hingga istilah-istilah asing yang tidak pernah digunakan oleh media-media Barat yang mendominasi Timur Tengah sebelumnya. Apabila media barat menyebut suatu peristiwa sebagai “terorisme” maka Al Jazeera TV akan menyebut peristiwa tersebut sebagai “jihad” atau “mati syahid”. Secara tidak langsung, masyarakat Timur Tengah yang menyaksikan berita tentang kekacauan di tanahnya sendiri, dan memakan korban bangsa Arab, maka akan setuju dengan pemilihan kata “jihad” tersebut (Eliades, 2006).

Cara yang paling banyak digunakan negara untuk melakukan diplomasi publik adalah melalui media massa. Menurut Philip Seib, politik dan media tidak bisa dipisahkan karena media dapat menjadi saluran yang tepat untuk menghubungkan elit politik dan masyarakat (Seib, 2013). Stasiun televisi merupakan salah satu media massa yang paling memberi pengaruh dalam kondisi politik suatu negara. Adapun beberapa ungkapan yang cukup terkenal mengenai televisi adalah “*The cameras are not everywhere, but where the cameras operate the facts are brutally clear*” (Taylor, 1997) ; “*seeing is believing*” ; “*a picture is worth a thousand words*” ; dan “*the camera never lies*”. Televisi memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai suatu informasi karena menghadirkan potongan gambar secara riil dari tempat kejadian. Hal tersebut menjelaskan mengapa masyarakat lebih tertarik dengan berita yang dihadirkan televisi dibandingkan media masa lainnya. Peran media massa dalam hubungan antar negara terlihat lebih menonjol apabila terjadi konflik antar negara yang bersangkutan. Media massa masing-masing negara cenderung untuk memberitakan kejadian tersebut berdasarkan sudut pandang negaranya saja. Hal tersebut tentu bertolak belakang dengan prinsip media massa yang seharusnya *cover both sides*. Perilaku berat sebelah ini menjadi alasan atas “kecacatan” media dalam pemberitaan. Sebuah media yang mengandung kepentingan nasional negara asalnya akan memilah-milah terlebih dahulu sebuah informasi berdasarkan arah politik negaranya sebelum diberitakan kepada masyarakat (Taylor, 1997). Kecacatan yang sekaligus merupakan kekuatan dari media massa tersebut digunakan oleh negara untuk mencapai tujuan politiknya.

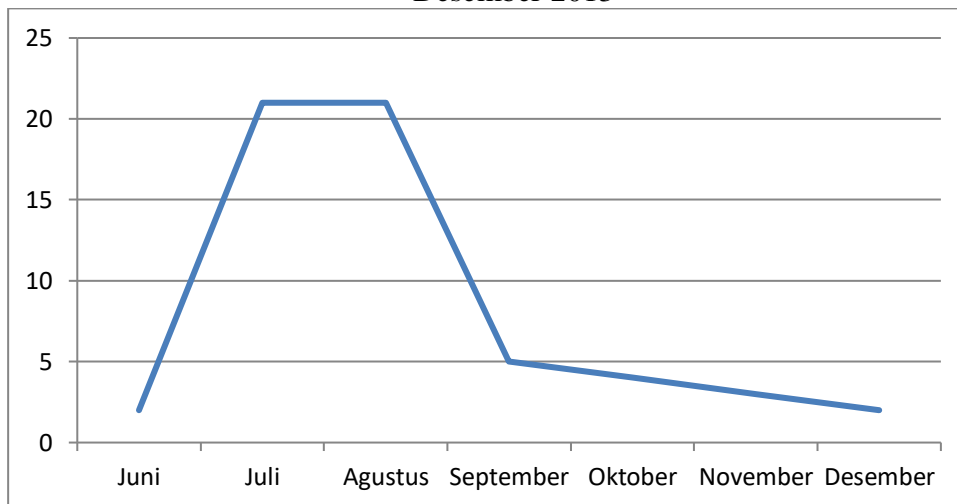
Melalui daya tariknya, media digunakan oleh pemerintah untuk mempercepat mobilisasi politik. Mobilisasi politik yang dimaksud dapat berupa pancingan kepada khayalak untuk bersimpati hingga ikut berdemonstrasi atas suatu kejadian (Coban, 2016). Mobilisasi politik media yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk membantu legitimasi rezim atau aturan baru agar dapat diterima oleh masyarakat. Peran media sebagai penyebar informasi digunakan sebagai perpanjangan tangan pemerintah kepada masyarakat. Namun,

dikarenakan fungsi utama media adalah untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat luas, media justru dapat menjadi dua mata pisau bagi pemerintah itu sendiri. Media justru dapat memantik dan menggiring masyarakat untuk melawan pemerintahannya sendiri melalui pemberitaan-pemberitaan yang mengkritisi kinerja pemerintah (Coban, 2016) Seperti yang telah dibahas sebelumnya, hal ini berarti potensi media tergantung kepada bagaimana dorongan politik yang ada di belakang media tersebut. Model diplomasi publik yang dilakukan Qatar melalui Al Jazeera TV ini menurut Samuel Azran dikategorikan sebagai “*hybrid model diplomacy*”. Yang dimaksud dengan *hybrid model diplomacy* Al Jazeera TV adalah kegiatan diplomasi yang dilakukan oleh media yang disponsori oleh sebuah negara, namun terdaftar sebagai media swasta dan media tersebut menjalankan fungsi ganda yaitu menyiarkan berita secara bebas dan kritis seperti media swasta lainnya, serta menjadi peneras suara pemerintah di saat terjadi krisis (Abdulnabi, 2017). Penelitian yang dilakukan oleh Samuel Azran pada tahun 2001 hingga 2008 tersebut menemukan bahwa terdapat koneksi yang kuat antara *coverage* yang dilakukan oleh Al Jazeera TV dan kepentingan nasional Qatar. Sebagai contoh, dalam penelitiannya Azran mendapati bahwa selama meningkatnya tensi antara Qatar dan Arab Saudi, berita negatif tentang Arab Saudi ikut meningkat pula. Untuk menyeimbangkan pemberitaan negatif tersebut, Al Jazeera TV juga mempunyai program-program acara yang sangat diminati oleh masyarakat Timur Tengah. Program-program diskusi dan debat yang mengangkat isu-isu Islam lalu membahasnya dalam perspektif modern adalah tema andalan Al Jazeera TV. Revolusi media oleh Al Jazeera TV, yang kemudian memberikan kesan segar, berani, dan sangat berbeda dengan stasiun-stasiun televisi sebelumnya di Timur Tengah juga semakin membuat media ini semakin melekat di hati masyarakat. Keseimbangan tersebut semakin memperkuat posisi Al Jazeera TV sebagai alat diplomasi publik Qatar. Meskipun Qatar terus menyatakan Al Jazeera TV terdaftar sebagai stasiun televisi swasta, independen, dan bebas dari unsur politik manapun, fakta bahwa Al Jazeera TV terus menerima aliran dana dari pemerintah Qatar, dan betapa stabilnya kantor berita ini setelah beberapa kali mengalami guncangan seperti tidak tercapainya target pendapatan hingga kecaman dari negara-negara lain semakin memperkuat spekulasi bahwa ada kekuatan besar yang selalu menyokong stasiun televisi ini, yang tidak lain adalah Qatar. Menurut Lamloum, apabila Al Jazeera TV benar-benar bebas dari segala nilai politik yang ada, maka seharusnya struktur organisasi kantor berita ini harus independen dan terpisah dari segala hal yang berkaitan dengan lembaga politik. Ikatan kuat antara Al Jazeera TV dan Qatar ini menunjukkan bahwa sebuah stasiun televisi dapat digunakan sebagai alat politik luar negeri untuk menyampaikan kepentingan nasional sekaligus penyokong suara kaum revolusionis yang menginginkan perubahan di jazirah Arab (Zayani, 2016). Modus operandi ini membuat Al Jazeera TV sebagai pusat transformasi sejarah yang terjadi di regional tersebut semenjak terjadinya Arab Spring pada tahun 2011.

Al Jazeera Mubasher (Al Jazeera TV cabang Mesir) secara terang-terangan menunjukkan keberpihakan pada kelompok Ikhwanul Muslimin yang pro Morsi. Keberpihakan Al Jazeera dapat terlihat dari pola pemberitaan stasiun televisi ini atas krisis yang terjadi. Al Jazeera Mubasher menyiarkan secara langsung aksi protes di ibukota Kairo, stasiun televisi ini menayangkan dua kubu yang bersebrangan dalam tangkapan layar yang terpisah (*split screen*). Kubu pro Morsi (Ikhwanul Muslimin) selalu ditampilkan penuh dan ramai, sementara kubu anti Morsi ditayangkan kosong tanpa massa. Padahal, kubu anti Morsi juga mempunyai massa yang cukup banyak, namun yang ditayangkan Al Jazeera hanyalah pada hari dimana massa kubu ini kosong (Mcevers, 2013). Berita tewasnya sekitar 50 orang anggota Ikhwanul Muslimin juga diberitakan secara berlebihan oleh stasiun televisi ini. Al Jazeera Mubasher justru melaporkan korban tewas dari pihak pro Morsi sebanyak ratusan jiwa. Militer Mesir pun segera mengonfirmasi jumlah korban jiwa melalui konferensi pers. Reporter Al Jazeera yang turut hadir pada konferensi pers tersebut mendapat teriakan dan

cemoohan dari jurnalis-jurnalis lainnya. Melalui tayangan-tayangan berita yang diunggah Al Jazeera di saluran *Youtube* Al Jazeera English dan Al Jazeera Mubasher, penulis mendapati kecondongan stasiun televisi ini terhadap Ikhwanul Muslimin sebagai pihak Pro-Morsi. Kecondongan Al Jazeera terlihat dari bahasa dari *headlines* yang digunakan serta gambar yang ditampilkan, yang menggunakan sudut pandang kelompok Pro-Morsi sebagai pihak yang tertindas. Berikut adalah grafik intensitas pemberitaan Al Jazeera mengenai konflik ini selama bulan Juni hingga Desember 2013 :

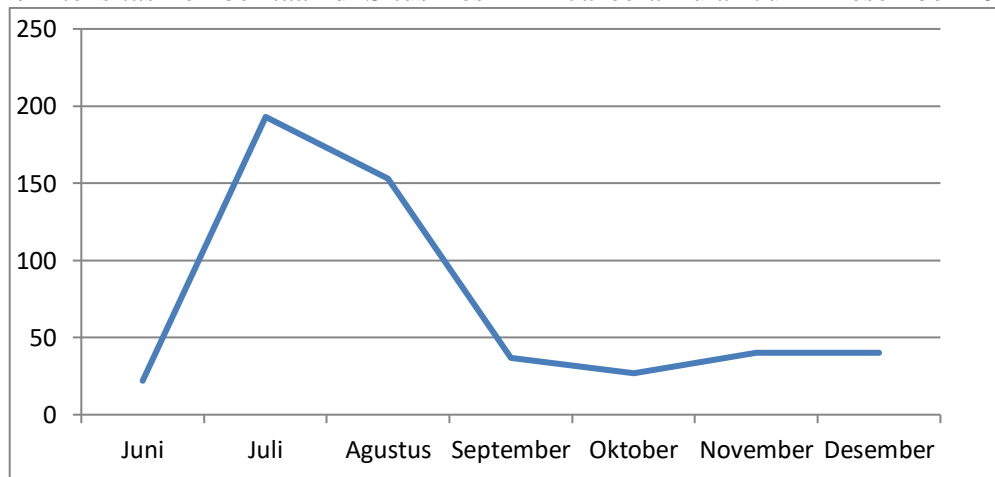
Grafik 1. Intensitas Pemberitaan di Saluran Youtube Al Jazeera Bulan Juni-Desember 2013



Sumber : hasil olahan penulis melalui Youtube

Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa bulan Juli dan Agustus adalah puncak intensitas pemberitaan Al Jazeera tentang konflik ini. Jumlah video yang di upload Al Jazeera pada saluran Youtubanya pada bulan Juli dan Agustus pun sama yaitu masing-masing 21 video. *Headlines* yang diangkat Al Jazeera pada bulan Juli, bulan dimana Presiden Morsi digulingkan oleh militer dan puncak demonstrasi terjadi pun menunjukkan kecondongan terhadap kelompok Pro Morsi (Ikhwanul Muslimin). Kecondongan Al Jazeera juga dapat dilihat dari artikel berita yang di unggah stasiun televisi ini pada situs resmi Al Jazeera. Penulis menghitung jumlah berita yang diunggah Al Jazeera dari bulan Juni (awal konflik mulai memanas) hingga Desember 2013.

Grafik 2. Intensitas Pemberitaan di Situs Resmi Al Jazeera Bulan Juni- Desember 2013



Sumber : hasil olahan penulis melalui situs Al Jazeera

Grafik menunjukkan, pemberitaan Al Jazeera mengenai konflik ini semakin naik pada bulan Juli 2013. Pada bulan Juni, terhitung Al Jazeera mengunggah 22 judul berita yang berkaitan dengan konflik penggulingan Presiden Morsi. Pada bulan Juli, sebagai bulan puncak pemberitaan topik ini, terhitung Al Jazeera mengunggah total 193 judul berita dengan rata-rata 6 judul berita yang dirilis setiap harinya. Satu bulan setelah Presiden Morsi pun, Al Jazeera masih giat memberitakan konflik ini. Terhitung 153 judul berita dirilis pada bulan Agustus. Intensitas pemberitaan Al Jazeera mulai menurun pada bulan September, dengan hanya merilis total 37 judul berita terkait. Oktober dengan total 27 judul berita, November 40 judul berita, dan Desember 40 judul berita

Secara keseluruhan, dapat dikatakan bahwa Qatar secara efektif telah mempromosikan tujuan diplomasi publiknya dengan Al Jazeera sebagai jaringan *hybrid* yang indenpendensinya dibatasi oleh batas-batas kepentingan Qatar (Azran, 2013). Status Al Jazeera yang merupakan stasiun televisi milik pribadi, namun dapat memberikan dampak yang sangat besar terhadap suasana politik Timur Tengah, bahkan sempat dituntut untuk ditutup secara paksa oleh negara-negara Teluk pada saat Krisis Qatar merupakan fenomena yang unik. Dalam bacaan Al Jazeera, Qatar, and New Tactics in State- Sponsored, penulis menyebutkan dua alasan mengapa Qatar sukses melakukan Diplomasi Publik melalui saluran Al Jazeera. Pertama, di region Timur Tengah, Qatar adalah negara kecil namun kaya raya, yang tidak terlalu terlibat dalam konflik internasional yang ada. Sebelum Krisis Qatar pada tahun 2017, hubungan Qatar dengan Al Jazeera terkesan “tersamarkan” karena meskipun tidak sekali dua kali beberapa negara melayangkan protes kepada Qatar atas pemberitaan kritis Al Jazeera yang dianggap adalah intervensi, stasiun televisi ini tetap terselamatkan karena status kepemilikannya. Selain itu, penonton Al Jazeera TV juga menunjukkan sikap salut pada stasiun televisi ini karena meskipun negara asal Al Jazeera yaitu Qatar adalah negara yang kecil dan sebelumnya tidak mempunyai kekuatan politik yang signifikan, Al Jazeera TV tetap berani menampilkan berita yang kritis. Kedua, Qatar mempunyai sumberdaya dan motivasi yang memadai untuk terus berinvestasi pada jaringan berita ini. Menurut Powers, Qatar adalah negara *micro-state* yang ambius dalam mengoperasikan jaringan yang berfungsi untuk menyuarakan suara Qatar secara global, oleh karena itu negara ini bersedia berinvestasi dalam jumlah yang sangat tidak sedikit. Eksistensi Al Jazeera terbukti dapat meningkatkan status politik Qatar menjadi semakin dikenal dunia global. (Powers & Gilboa, 2007)

Setelah mengetahui peran agenda setting Al Jazeera TV dalam konflik tersebut, pembahasan selanjutnya adalah kepentingan apa yang berusaha disematkan Qatar melalui stasiun televisi ini. Qatar sendiri mempunyai Qatar National Vision (QNV) yang merupakan pilar-pilar pembangunan Qatar yang ditetapkan oleh Emir Hamad. Pilar QNV yang kedua, yaitu Pembangunan Sosial dalam poin Kerjasama Internasional cukup menarik untuk disoroti. Dalam situs resmi Qatar National Vision, dijelaskan bahwa seiring dengan meningkatnya peran Qatar dalam ekonomi, politik, dan budaya di lingkungan Gulf Cooperation Council (GCC), Liga Arab, dan Organisasi Islam lainnya, Qatar merasa perlu memberi kontribusi lebih dalam hubungan-hubungan tersebut. Poin ini juga menggaris bawahi tentang perlu kontribusi lebih dari Qatar terhadap perdamaian dunia melalui pengawalan terhadap jalannya Hak Asasi Manusia. Hal ini sesuai dengan misi yang digadang-gadangkan Al Jazeera TV yang memantik mulainya kehidupan bebas berpendapat di Timur Tengah. Kontribusi lebih tersebut menurut Abdullah Baabod adalah strategi Qatar untuk bertahan di regionalnya. Secara geografis, Qatar berukuran sangat kecil dan diapit dua negara yang cukup sering berseteru yaitu Arab Saudi dan Iran. Hal ini membuat Qatar terancam keamanan regionalnya. Sebagai negara anggota GCC (Gulf Cooperative Countries), Qatar sebelumnya mempunyai hubungan yang baik dengan Arab Saudi, namun disisi lain negara ini juga mempunyai kerjasama ladang gas alam (LNG) dengan Iran. Kedekatan Qatar dengan dua negara tersebut menempatkan negara ini ke dalam posisi yang dilematis.

Pasalnya, sensitifitas Arab Saudi terhadap Iran mengakibatkan negara ini mengancam siapa saja yang mempunyai kedekatan dengan Iran. Qatar yang terjebak dalam posisi sulit tersebut harus menyeimbangkan diri di antara dua negara tersebut sembari melindungi diri dari potensi krisis regional. Posisi “serba sulit” tersebut membuat Emir Hamad mengambil langkah yang dinilai dapat mengamankan negaranya (Baabod, 2017). Selama bertahun-tahun, negara di Timur Tengah hanya menjadi “saksi bisu” dari berbagai ketegangan yang terjadi di Timur Tengah baik di tingkat internal ataupun regional. Pada tingkatan regional, konflik yang sering terlihat adalah ketegangan antara Arab Saudi dan Iran. Untuk terhindar dari kompetisi tersebut, dimulai dari masa pemerintahan Emir Hamad, Qatar memutuskan untuk memperkuat hubungan diplomatik dengan aktor-aktor regional dan internasional lainnya. Qatar memulai perannya sebagai “mediator” di Timur Tengah melalui siaran Al Jazeera TV. Al Jazeera yang dalam pemberitaan mengambil sudut pandang yang cenderung berseberangan dengan pemerintah negara berkonflik dianggap sebagai usaha mediasi agar aspirasi masyarakat sampai ke pemerintah dan fakta lain akan suatu peristiwa diketahui dunia.

Selain itu, Qatar juga diketahui mempunyai hubungan dekat dengan kelompok Ikhwanul Muslimin. Anggota Ikhwanul Muslimin yang ada di Qatar juga tidak sedikit jumlahnya. Hal ini tidak hanya disebabkan karena Imam Qaradawi yang merupakan petinggi Ikhwanul Muslimin adalah sosok yang sangat dihormati di Qatar, melainkan memang kebijakan Qatar sendiri sangat terbuka terhadap imigran (Roberts, 2017). Pengungsi asal Palestina dan negara lainnya pun sangat diterima di Qatar. Sikap terbuka Qatar bukan berarti tanpa alasan atau hanya sekedar menunjukkan etika baik, melainkan Qatar dalam kondisi yang membutuhkan tenaga pendidik yang memberikan ilmu baru (Roberts, 2017). Faktor-faktor tersebut adalah penyebab kenapa Qatar mempunyai kedekatan spesial dengan organisasi Ikhwanul Muslimin, yang justru malah dianggap sebagai kelompok teroris oleh negara-negara Teluk. Kedekatan Qatar dengan Ikhwanul Muslimin bahkan menjadi alasan kenapa negara kecil namun kaya ini sempat diblok oleh negara-negara tetangganya, negara anggota GCC.

KESIMPULAN

Al Jazeera TV yang disponsori langsung oleh Pemerintah Qatar menjalankan perannya dengan baik sebagai alat diplomasi publik terhadap negara-negara Timur Tengah pada umumnya dan Mesir pada khususnya. Diplomasi publik yang berusaha dimunculkan Qatar adalah citra sebagai negara kecil namun progresif yang memegang peran sebagai mediator di regional tersebut. Peran mediator yang dimaksud adalah, dengan pemberitaannya yang kritis dan berani serta menggunakan sudut pandang diluar aktor pemerintah negara yang berkonflik telah membawa aspirasi masyarakat yang selama ini tidak pernah mempunyai wadah dan kesempatan untuk muncul ke permukaan. Al Jazeera yang kemudian berperan sebagai jembatan aspirasi masyarakat memiliki andil yang besar dalam proses demokratisasi Timur Tengah. Dalam konflik ini, Al Jazeera menunjukkan kecondongannya kepada kelompok Pro Morsi, yaitu Ikhwanul Muslimin. Dimulai dari sudut pandang, pola bahasa, dan tayangan gambar yang dihadirkan Al Jazeera atas kasus ini sangat menunjukkan kecondongan terhadap Ikhwanul Muslimin. Hal ini disebabkan oleh adanya kepentingan Qatar sebagai negara *headquarter* yang diselipkan dalam *coverage* ini. Qatar memang diketahui mempunyai hubungan dekat dengan organisasi muslim tertua di dunia ini. Hubungan dekat tersebut diawali dari jasa besar yang diberikan tokoh penting Ikhwanul Muslimin, Imam Qaradawi untuk Qatar.

REFERENSI

- Abdulnabi, Z., 2017. Al-Jazeera's Relationship with Qatar before and After Arab Spring : Effective Public Diplomacy or Blatant Propaganda. Research Gate.
- Azran, T.-S., 2013. Al-Jazeera, Qatar, and New Tactics in State-Sponsored Media Diplomacy. Research Gate.
- Baabod, A., 2017. Qatar's Resilience Strategy and Implications for State-Society Relations. Istituto Affari Internazionali.
- Bahry, Louay Y. "The New Arab Media Phenomenon : Qatar's Al- Jazeera". Middle East Policy, Vol. VIII, No. 2, Juni 2001.
- Coban, F., 2016. The Role of the Media in International Relations: From the CNN. Journal of International Relations and Foreign Policy, Volume 4.
- Eliades, Nicolas. 2006. The Rise of Al Jazeera. Peace and Conflict Monitor, 6 Juni 2006, dilihat 2 Mei 2019 <http://www.monitor.upeace.org/printer.cfm?id_article=370>
- Mcevers, K., 2013. National Public Radio. [Online]
- Powers, S. & Gilboa, E., 2007. The Public Diplomacy of Al Jazeera.
- Roberts, D., 2017. Qatar and the Muslim Brotherhood : Pragmatism or Preference? [Online] Available at: <https://mepc.org/qatar-and-muslim-brotherhood-pragmatism-or-preference> [Accessed 10 December 2019].
- Seib, P., 2013. Public Diplomacy and The Media in The Middle East. Los Angeles: Figueroa Press.
- Taylor, M. P., 1997. Global Communication, International Affairs, and the Media since 1945. New York: Routledge.
- Zayani, Mohamed (2005). *The Al Jazeera Phenomenon Critical Perspectives on New Arab Media*. Pluto Press, United Kingdom.